

OPTIMALISASI PERAN PERKUMPULAN FORUM KOMITE SEKOLAH PROVINSI GORONTALO

Arwildayanto^{*1}, Fory Armin Nawai^{*2}

¹²Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

* Penulis Korespondensi : ¹arwildayanto@ung.ac.id, ²forynawai@ung.ac.id

Abstrak

Salah satu organisasi milik sekolah yang yang menjadi wadah bagi stakeholder sekolah untuk bisa memberikan perannya pada penyelenggaraan pendidikan adalah komite sekolah. Peran komite sekolah tersebut di Provinsi Gorontalo perlu dimaksimalkan melalui workshop dalam bentuk focus group discussion (FGD). Kegiatan tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menindaklanjuti penelitian yang telah dilaksanakan tahun 2017-2018 tentang budaya Huyula (gotong-royong) pembayaran SPP yang belum sesuai ekspektasi. Kegiatan yang memiliki tema tentang optimalisasi partisipasi komite sekolah tersebut terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan kesepakatan penting disertai dengan pembentukan forum komite sekolah di Provinsi Gorontalo yang memiliki akta otentik. Adanya forum penting ini dapat dimaksimalkan pada aspek strategis berikut; 1) memberikan fasilitas untuk berbagi pengetahuan maupun pengalaman antar komite sekolah mengenai keberhasilan dalam memaksimalkan peran stakeholder sekolah dalam hal pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan, 2) sebagai sarana belajar bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan FIP UNG dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, 3) menjadi ide mendidik tentang dana sekolah menjadi tanggung jawab negara dan penggunaan dana operasional sekolah hanya untuk menutupi standar minimal, sedangkan peningkatan mutu sekolah yang unggul memerlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat, 4) memperkuat slogan tentang pendidikan gratis, 5) mensosialisasikan Gerakan Huyula untuk mewujudkan sekolah unggul.

Kata kunci: *Optimalisasi, Forum Komite Sekolah*

Abstract

One of the school-owned organizations that becomes a forum for school stakeholders to be able to give their role in the implementation of education is the school committee. The role of the school committee in Gorontalo Province needs to be maximized through workshops in the form of focus group discussions (FGD). This activity is a form of community service in an effort to follow up on research that has been carried out in 2017-2018 on Huyula culture (gotong royong) to pay tuition fees that have not met expectations. The activity with the theme of optimizing school committee participation was carried out well, resulting in an important agreement accompanied by the establishment of a school committee forum in Gorontalo Province that had an authentic certificate. The existence of this important forum can be maximized in the following strategic aspects; 1) provide facilities for sharing knowledge and experiences between school committees regarding success in maximizing the role of school stakeholders in terms of funding for education implementation, 2) as a learning tool for students of the Education Management Study Program FIP UNG in organizing activities involving external parties, 3) became the idea of educating about school funds being the responsibility of the state and the use of school operational funds only to cover minimum standards, while improving the quality of superior schools requires support from parents and the community, 4) strengthening the slogan about free education, 5) socializing the Huyula Movement for create an excellent school.

Keywords: *Optimization, School Committee Forum*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Peran pendidikan dalam program pembangunan SDM tentunya didukung oleh

pemerintah melalui lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal. Proses pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah melalui pembelajaran yang dilakukan guru kepada peserta didik/siswa (Mustadi dkk, 2016). Lembaga

pendidikan semestinya untuk senantiasa berkembang demi meningkatkan mutunya. Peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan senantiasa terus dilakukan (Basith & Rahmawati, 2020).

Pada penyelenggaraan program pendidikan di sekolah perlu melibatkan semua elemen masyarakat guna meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan (Mulyono dan Pardjono, 2014). Sebagaimana dijelaskan Yusuf (2015) bahwa berhasilnya pembelajaran bukan saja ditentukan oleh kinerja sekolah dan kualitas pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh partisipasi stakeholder sekolah yang turut memberikan kontribusinya sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Keterlibatan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur berdes Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tepatnya pada pasal 188 ayat 2 dimana poin penting terkait peran serta masyarakat mencakup: penyediaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan yang mencakup semua tingkatan, penggunaan hasil-hasil pendidikan, pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta pemberian bantuan dan fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tersebut memberikan peluang bagi perubahan paradigma pemerintahan dari bentuk sentralisasi ke bentuk desentralisasi. Selain itu, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan (Zulkifli, 2015). Otonomisasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah adalah wujud perhatian pemerintah terhadap hal-hal yang timbul di tengah masyarakat dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Namun pemberian otonomi pada pihak sekolah membutuhkan suatu pendekatan manajemen yang dapat memberikan dukungan bagi sekolah untuk dapat memenuhi kebutuhannya sekaligus untuk memberdayakan seluruh elemen masyarakat secara efektif untuk menjadi pendukung pengembangan demi kemajuan sekolah. Pada aspek inilah konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berfungsi sebagai langkah baru yang ditawarkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan program MBS di sekolah sangat membutuhkan adanya partisipasi dan dukungan dari semua elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat ataupun stakeholder sekolah di bidang pendidikan terwujud dalam suatu organisasi non formal yang dikenal sebagai komite sekolah (Febriana, 2019).

Komite sekolah atau *school board* merupakan suatu organisasi resmi yang berfungsi untuk mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan sekolah serta sebagai wadah dari seluruh *stakeholders* sekolah yang bertugas untuk mendukung

sekolah dengan segenap kemampuannya demi meningkatkan kinerjanya dalam menyeenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Wardiah dkk., 2015). Efendi, dkk (2020) menjelaskan tentang komite sekolah bahwa perannya sangat besar dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan jika dapat diberdayakan dan difungsikan dengan baik oleh lembaga pihak sekolah.

Adanya komite sekolah dapat memberi peranan yang sangat penting terhadap peningkatan kualitas sekolah pada aspek manajemennya. Tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan visi dan misi sekolah dapat terwujud dengan baik dengan memaksimalkan kinerja komite sekolah sesuai dengan fungsi dan tujuannya (Basith & Rahmawati, 2020). Peran aktif komite sekolah dapat dioptimalkan, terutama peran aktif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Saran dan masukan dari masyarakat mengenai kondisi pendidikan dan arah pendidikan yang harus dilaksanakan sangat diharapkan dari pihak komite sekolah. Hal tersebut diperlukan bagi sekolah untuk menjadi referensi terkait dengan evaluasi dan masukan agar mutu pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat dapat tersampaikan (Kartini, dkk., 2020).

Komite sekolah sebagai lembaga yang dibentuk guna meningkatkan keikutsertaan semua tokoh masyarakat dan juga orang tua siswa dalam proses penyusunan perencanaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam manajemen sekolah (Mulyono dan Parjono, 2014). Keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan hanya diperlukan untuk memberikan dukungan berupa material semata, namun juga dukungan berupa ide yang sifatnya inovatif untuk kemajuan sekolah (Mustakim dkk, 2013). Komite sekolah bertujuan sebagai wadah bagi masyarakat selaku elemen penting yang juga memiliki rasa tanggung jawab dengan menyalurkan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan operasional di sekolah demi pencapaian layanan pendidikan yang berkualitas.

Pembentukan forum komite sekolah dan optimalisainya perlu untuk dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di sekolah dapat terlaksana secara optimal. Keterlibatan forum tersebut diharapkan mampu mengakomodir segala kebutuhan sekolah dan membantu meningkatkan kinerja sekolah demi terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dengan hasil belajar memuaskan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mustakim dkk. (2013) bahwa forum komunikasi menjadi wadah untuk proses komunikasi bagi pihak komite sekolah. Forum komunikasi tersebut menjadi wadah untuk pertukaran informasi. Melalui pertemuan dan diskusi dalam forum tersebut dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nuraya, dkk. (2021) diuraikan bahwa komite sekolah sudah menjalankan semua tugas dan tanggung

jawabnya meskipun belum maksimal. Hasil penelitian Herwan, dkk. (2018) terkait peran komite sekolah sebagai pendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, disimpulkan bahwa terkadang koordinasi yang dilakukan antara sekolah dengan komite sekolah selaku mitra sekolah masih kurang sehingga informasi tidak sampai ke pihak komite sekolah. Minimnya pemberian penghargaan yang diperoleh pihak komite sekolah juga menjadi salah satu penghambat yang menyebabkan motivasi komite sekolah untuk terlibat secara aktif menjadi rendah. Selain itu, tidak semua anggota komite sekolah turut terlibat secara aktif. Terkait hal tersebut, Halik, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa permasalahan yang berkembang dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya adalah mensinergikan hubungan antara pihak sekolah dengan pihak komite sekolah yaitu melibatkan partisipasi komite sekolah untuk ikut berperan pada program peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Partisipasi komite sekolah untuk memberikan kontribusi dalam mengakomodasi pembiayaan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah perlu untuk dioptimalkan. Untuk itu, memberikan *workshop* atau pelatihan terkait peningkatan partisipasi komite sekolah sebagai mitra yang harmoni antara pihak sekolah dan stakeholdernya di Provinsi Gorontalo melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD) merupakan satu langkah penting dan strategis yang dapat dilakukan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan partisipasi komite sekolah selaku mitra sekolah sekaligus sebagai wujud upaya pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian tersebut sebagai upaya menindaklanjuti hasil penelitian yang dilakukan tahun 2017-2018 mengenai konteks budaya *Huyula* atau gotong royong untuk membayar SPP dimana hasilnya belum sesuai dengan harapan. Pencapaiannya masih pada kategori kurang baik. Sehingga diperlukan suatu untuk menindaklanjutinya guna meningkatkan partisipasi komite sekolah melalui pendekatan budaya *Huyula* (Arwildayanto, 2017).

Tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD bagi komite sekolah di Provinsi Gorontalo berupa pelatihan peningkatan peran dan fungsinya antara lain; 1) untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang komprehensif mengenai konsep dan fungsi komite sekolah dalam mendorong perbaikan demi pencapaian kualitas layanan di bidang pendidikan, 2) memberikan informasi dan pengetahuan tentang strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran orang tua siswa dan masyarakat dalam hal pendanaan pendidikan, 3) menganalisis segala keunggulan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh komite sekolah selama menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, 4) menyamaratakan sudut pandang mengenai peranan hubungan antara sekolah dengan masyarakat selaku elemen penting yang memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan program

pendidikan, 5) memberikan pengetahuan mengenai pentingnya peran komite sekolah dalam memantau penyaluran keuangan sekolah dan memberikan penilaian terhadap pencapaian program pendidikan, 6) membentuk forum komunikasi komite sekolah di seluruh sekolah tingkat SMA sederajat yang ada di daerah Provinsi Gorontalo untuk menjadi wadah komunikasi antara komite sekolah dalam berbagi informasi dan pengetahuan, berbagi teknik kinerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta hal-hal strategis lain yang dapat dilakukan guna memajukan keterlaksanaan program pendidikan di sekolah.

2. BAHAN DAN METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan atau *workshop* ini adalah pendekatan diskusi forum berupa *Focus Group Discussion* (FGD). Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan informasi dari peserta FGD terkait tugas pokok dan fungsi komite sekolah, serta faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat bagi kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Setelah itu, langkah berikutnya yang dilakukan adalah melakukan asesmen kebutuhan untuk menyiapkan bahan utama dan bentuk pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta FGD.

Mengacu pada hasil asesmen tersebut, dilakukan penyampaian materi melalui forum FGD tentang berbagai hal yang dapat dilakukan oleh komite sekolah untuk mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah, strategi memaksimalkan kontribusi stakeholder sekolah dalam pendanaan pendidikan di sekolah, menggarap secara tekun dan cermat mengenai keunggulan dan kelemahan serta peluang dan hambatan yang dihadapi komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya, kemudian strategi yang diterapkan dalam membangun kemitraan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, serta pentingnya partisipasi komite sekolah dalam memantau keuangan beserta tolok ukur keberhasilan/pencapaian penyelenggaraan program pendidikan. Pada tahap ini, diminta perwakilan komite dari setiap sekolah SMA/ sederajat tingkat kabupaten sebanyak 5-6 sekolah sebagai perwakilan dari setiap kabupaten/kota.

Seluruh peserta forum FGD diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah dan hal-hal yang dihadapi komite sekolah selama melaksanakan tugas, sekaligus memberikan tanggapannya terkait rencana pembentukan forum komunikasi antar komite sekolah (FK2S) pada tingkat SMA dan sederajat di Provinsi Gorontalo. Setiap kabupaten dipilih satu perwakilan untuk pembentukan FK2S Provinsi Gorontalo, sekalian juga menyampaikan hasil kajiannya dalam forum FGD, dan selanjutnya direspon dan dilakukan pendalaman oleh peserta diskusi lainnya, seperti gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan FGD komite sekolah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan workshop melalui FGD merupakan suatu bentuk upaya merekayasa sosial demi peningkatan partisipasi komite sekolah tingkat SMA sederajat di Provinsi Gorontalo yang sukses diselenggarakan pada hari Sabtu tepatnya tanggal 6 Oktober tahun 2018, bertempat di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dekan FIP UNG, yaitu Bapak Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd. Pematerinya dalam workshop tersebut adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, diwakili oleh Koordinator Pengawas SMA/SMK yakni Drs. Usman Madina, M.Si. Diskusi melalui FK2S di Provinsi Gorontalo dilakukan demi meningkatkan kontribusi komite sekolah sebagai mitra yang bisa membantu sekolah pada tingkat SMA sederajat di Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan program pendidikan.

Pada tahap awal kegiatan ini, pemateri melakukan penggalian informasi pada peserta FGD tentang situasi dan permasalahan yang terjadi di sekolah mitra masing-masing komite sekolah, beserta segala faktor yang menjadi pendukung dan juga hal-hal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik itu berkaitan dengan tugas kepala sekolah selaku manajer di sekolah, dan juga terkait dengan keikutsertaan seluruh stakeholder sekolah. Selain itu, pada tahap ini juga menggali informasi dari peserta FGD mengenai pemahamannya terkait tugas pokok dan fungsi komite sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam memberikan asesmen kebutuhan terkait penyiapan segala kebutuhan dan bentuk pelatihan yang dianggap sesuai dengan keadaan peserta FGD agar kegiatan pelatihan ini berjalan sesuai harapan.

Pemberian materi yang disampaikan dalam FGD berhubungan dengan tugas-tugas dan kewajiban komite sekolah dalam mendorong perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Selain itu, materi yang disampaikan juga tentang strategi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kontribusi stakeholder sekolah dalam hal mendukung pendanaan pendidikan,

serta melakukan elaborasi terhadap keunggulan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi oleh pihak komite sekolah se-Provinsi Gorontalo selama menjalankan kewajibannya. Aspek lainnya yang disampaikan pada penyampaian materi ini juga tentang strategi untuk membangun dan memperkuat kemitraan antara sekolah dan seluruh stakeholdernya sebagai elemen penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pendidikan, serta pentingnya peranannya dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan/penyaluran dana di sekolah sekolah disertai dengan tolok ukur keberhasilannya.

Pada pelaksanaan kegiatan FGD, terwujud suatu kesepakatan strategis yang disusun secara bersama dengan dibentuknya Forum Komite Sekolah (FKS) di Provinsi Gorontalo yang berbadan hukum berdasarkan SK Menkum HAM #AHU0013538.AH.01.07 2018 oleh Notaris Ardy Chandra SH., M.KN di Gorontalo. Wujud pengesahan kesepakatan tersebut tampak seperti gambar 2.



Gambar 2. Akta Notaris FKS Gorontalo

Setelah pembentukannya, kehadiran forum ini dapat dimaksimalkan pada beberapa aspek strategis, seperti memberikan fasilitas terhadap keterlaksanaan berbagi pengalaman antar sekolah dan keberhasilannya dalam memaksimalkan peranserta seluruh stakeholder, salah satunya pada aspek pembiayaan pendidikan di sekolah. Kehadiran forum ini juga dapat dimaksimalkan oleh mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan FIP UNG untuk menjadi sarana pembelajarannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak eksternal. Aspek strategis lainnya yang adalah sebagai ide mendidik tentang dana di sekolah yang menjadi tanggung jawab negara, sementara dana operasional milik sekolah hanya dapat digunakan guna menutupi kebutuhan standar minimal. Adapun terkait untuk

peningkatan mutu dalam hal untuk mewujudkan sekolah yang unggul membutuhkan dukungan masyarakat, terutama orang tua siswa. Adanya forum ini juga dapat mengukuhkan slogan tentang pendidikan gratis dalam tujuannya untuk konsep pemerataan layanan pendidikan sehingga setiap individu dapat bersekolah (*education for all*), serta menjadi wadah penting terkait sosialisasi Gerakan Huyula dari orang tua siswa dan juga masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam rangka mewujudkan sekolah unggulan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan FGD dimana terjadi perubahan, sebagaimana tercantum pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perubahan optimalisasi peran komite sekolah

Kegiatan	Perubahan diharapkan dan menjadi realitas dampak dari pengabdian masyarakat.	
	Sebelum	Sesudah
Pengetahuan pengurus tentang peran komite sekolah.	Pengurus Komite SMA, SMK, dan MA masih banyak yang belum paham mengenai peran dan fungsinya.	Pengurus Komite SMA, SMK, dan MA bisa mengetahui peran dan fungsinya dengan baik.
Pandangan sekolah gratis dan partisipasi orang tua dan masyarakat.	Sekolah gratis untuk menghindari persoalan hukum, tidak menambah urusan, yang penting kerja selesai.	Perlu partisipasi, kesadaran warga sekolah agar pembiayaannya dibantu untuk mewujudkan sekolah yang unggul.
Forum Komunikasi Komite Sekolah Provinsi Gorontalo.	Belum terbentuk wadah forum komite sekolah tingkat SMA sederajat.	Terbentuknya wadah Forum Komite Sekolah (FKS) Gorontalo.

Keterangan: Berdasarkan kesimpulan diskusi FGD.

Optimalisasi peran dan fungsi FKS Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pendidikan, adalah diarahkan untuk memaksimalkan perannya sebagai pemberi masukan dan pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai mediator, dan sebagai pengontrol. FKS Gorontalo ditujukan untuk memaksimalkan partisipasi komite sekolah dalam hal memberikan masukan dan pertimbangan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan program yang disusun oleh pihak sekolah, seperti pembangunan ataupun rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang sifatnya sangat diperlukan. Selain itu, masukan dan pertimbangan juga dapat dimaksimalkan bila sekolah melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Adanya FKS Gorontalo juga diharapkan bisa memaksimalkan partisipasi dan pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah dan dalam hal memaksimalkan

perannya dalam menganalisis segala sumber daya pendidikan yang ada di tengah masyarakat untuk bisa difungsikan guna mendukung program di sekolah.

Terkait dengan tugas komite sekolah sebagai organisasi pendukung, FKS Gorontalo diharapkan dapat dioptimalkan oleh pihak komite sekolah agar bisa memberikan dukungan secara maksimal terhadap sekolah baik itu dukungan berupa tenaga, finansial, maupun dukungan berupa ide-ide penting. Dukungan berupa tenaga dapat dimaksimalkan dalam hal pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik sekolah, mulai dari perencanaan, pengumpulan dana, pelaksanaan, hingga sampai pada tahap pelaporan. Terbentuknya FKS Gorontalo juga diharapkan bisa mempermudah dan membantu pelaksanaan tugas komite sekolah dalam mengembangkan SDM di sekolah baik itu tenaga pendidiknya, tenaga kependidikan, dapat juga peserta didik.

Sehubungan dengan tugas komite sekolah sebagai mediator, FKS Gorontalo bisa dioptimalkan oleh komite sekolah untuk bisa menjalankan perannya selaku mediator dalam penyaluran aspirasi masyarakat terhadap sekolah. Peran dan fungsi sebagai mediator ini membutuhkan kecermatan komite sekolah dalam menganalisis segala kebutuhan dan ha-hal yang berkaitan dengan keluhan masyarakat, terutama orang tua siswa. Sehingga aspirasi yang disampaikan melalui komite sekolah tersebut dapat diterima dan diterapkan dengan baik di sekolah sebagai masukan atau koreksi demi pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. FKS Gorontalo diharapkan pula untuk bisa mengoptimalkan perannya dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan ataupun program-program yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa dan masyarakat.

Terbentuknya FKS Gorontalo juga diharapkan bisa dimaksimalkan oleh komite sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas atau pengontrol. Hal ini dapat dimaksimalkan untuk mengontrol terkait kebijakan-kebijakan di sekolah, mengontrol pengalokasian dana dan segala sumber daya dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Terkait tugasnya sebagai pengontrol, FKS Gorontalo diharapkan dapat dimaksimalkan komite sekolah untuk bisa melakukan fungsi sebagai pengontrol terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dapat dilihat dari kualitas luarannya. Sehingga hasil pengawasan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan selanjutnya demi kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pelaksanaan tugas komite sekolah sebagai pengawas dalam mengevaluasi setiap kegiatan di sekolah atas hasil pengawasan demi pengembangan untuk kepentingan sekolah terutama terkait dengan penambahan fasilitas sekolah yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan.

4. KESIMPULAN

Workshop dalam bentuk FGD ini dilakukan sebagai bentuk upaya optimalisasi peran forum komite sekolah di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, meliputi: pengalihan informasi, asesmen kebutuhan, penyampaian materi dan diskusi melalui FGD, dan pembentukan forum komunikasi komite sekolah (FK2S) Provinsi Gorontalo yaitu Forum Komite Sekolah (FKS) Gorontalo. Pembentukan forum komunikasi tersebut ditujukan untuk memaksimalkan peran komite sekolah dalam menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai mitra sekolah dalam berbagai aspek strategis baik itu dalam sebagai agen pemberi masukan/pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai mediator, maupun sebagai agen pengontrol. Tidak kalah pentingnya adalah menjadikan FKS Gorontalo sebagai sumber belajar bagi mahasiswa dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam membantu sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas terbentuknya forum komunikasi komite sekolah di Provinsi Gorontalo disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah membiayai kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai wujud pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini, antara lain: Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Kepala Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah SMA sederajat se-Provinsi Gorontalo sehingga terbentuk FKS Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Basith, A., & Rahmawati, I. (2020). Kontribusi kinerja komite sekolah terhadap peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 5(1), 14-25.
- Efendi, R., Fitriana, H., & Nurkhalis. (2020). Effect of role school committee and school operational fund on quality of education. *Journal of Social Work and Science Education*, 1(2), 194-203. DOI: <https://doi.org/10.52690/jswse.v1i2.48>
- Herwan, Aswandi, & Chiar, M. (2018). The role of school committee in supporting the fulfillment of education facilities and infrastructure. *Journal of Education, Teaching and Learning*, 3(2), 282-28. DOI: <http://dx.doi.org/10.26737/jetl.v3i2.763>
- Febriana, L. (2019). Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Palembang. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 1(2), 152-163.
- Halik, A., Das, W.H., Aswad, M., Rady, M.S., Dangnga, M.S., & Nasir, M. (2019). Empowerment of school committee in improving education service quality at public primary school in Parepare City. *Universal Journal of Educational Research*, 7(9). 1956-1963. DOI: 10.13189/ujer.2019.070915
- Kartini, Arafat, Y., & Wardiah, D. (2020). Collaboration of school committees and principal to the quality of education. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 20(1), 227-235. DOI: <http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v20.1.1742>
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2002). Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Mulyono, W.D., & Pardjono. (2014). Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 4(3), 391-404. DOI: <https://doi.org/10.21831/jpv.v4i3.2562>
- Mustadi, A., Zubaidah, E., & Sumardi. (2016). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, XXXV(3), 312-321. DOI: <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v35i3.10578>
- Mustakim, M., Rahamma, T., & Farid, M. (2013). Pemanfaatan forum komunikasi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan SMA di Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 2(3), 285-293. DOI: <http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v1i2.943>
- Nuraya, N., Adiman, Herawati, E.S.B., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R.R. (2021). Implementation of the roles and functions of the school committee in improving the quality of education services in the City of Cirebon. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 5(1), 81-100. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v5i1.2113>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Wardiah, S., Murniati, & Djailani. (2015). Strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(2), 12-21.
- Yusuf, F. (2015). Peran komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD Unggulan Aisyiyah Bantul. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 16(IV), 1-8.
- Zulkifli. (2015). Komite sekolah di antara cita dan realita. *Jurnal Potensia*, 14(1), 99-127.